

# HUBUNGAN KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANJAR

Machrul<sup>1</sup>, Khuzaini<sup>2</sup>, Rahmi Widyanti<sup>3</sup>  
E-mail: [machrul@ymail.com](mailto:machrul@ymail.com)

Magister Manajemen, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

## ABSTRAK

Machrul, 18920092. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan dari penelitian ini adalah rasio kemampuan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan ekonomi serta Regresi Linier Berganda Metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan Kemampuan Keuangan Daerah sebesar 11,88 % masuk dalam kualifikasi **kurang**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya, Kabupaten Banjar masih sangat tergantung pada sumber keuangan dari Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 13,97 % masuk dalam kategori **instruktif**. Ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Banjar belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Kemampuan Keuangan Daerah mempunyai hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat Pertumbuhan Ekonomi, artinya jika ada peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun namun tidak signifikan. Sedangkan untuk Kemandirian Keuangan Daerah mempunyai hubungan positif namun tidak signifikan terhadap tingkat Pertumbuhan Ekonomi, artinya jika ada peningkatan kemandirian keuangan daerah maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat namun tidak signifikan. Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Daerah secara bersama-sama tidak mempunyai hubungan secara signifikan terhadap tinggi rendahnya Pertumbuhan Ekonomi.

**Kata kunci : Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Kemandirian Daerah**

---

## ABSTRACT

*Machrul, 18920092. This research is descriptive research with a quantitative approach. The data analysis method used in this study is the ratio of regional financial ability, the ratio of regional financial independence and the ratio of economic growth and the Multiple Linear Regression Ordinary Least Square (OLS) method. The results showed that the Regional Financial Capability of 11.88% was included in the **low** qualification. This shows that in financing the implementation of government and its development, Banjar Regency is still very dependent on financial sources from the Center. Meanwhile, for Regional Financial Independence, 13.97% is included in the **instructive** category. This shows that the Banjar Regency Government has not been able to implement regional autonomy financially. Regional Financial Capability has a negative relationship but not significant effect on the level of Economic Growth, meaning that if there is an increase in Regional Financial Capability, economic growth will also decrease but not significantly. Meanwhile, regional financial independence has a positive relationship but not significant effect on the level of economic growth, meaning that if there is an increase in regional financial independence, economic growth will increase but not significantly. Regional Financial Capability and Regional Independence together do not have a significantly relationship to level of Economic Growth.*

**Keywords: Regional Autonomy, Regional Finance, Regional Independence**

## PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika

dalam perkembangan pemerintahan daerah sehubungan dengan tuntutan dan permasalahan yang terjadi. Perubahan peraturan tersebut telah memberikan dampak yang cukup besar bagi Pemerintah Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberi otonomi yang luas baik dalam urusan administrasi pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangannya. (Mardiasmo, 2004) menyatakan “Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan”.

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pada prinsipnya, kebijakan pengelolaan keuangan daerah mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kinerja keuangan daerah yang baik seiring tercapainya tujuan otonomi daerah itu sendiri.

**Tabel Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banjar Periode 2015 – 2019**

TAHUN	PAD	Pendapatan Transfer	KMD (%)
2015	172.554.625.628,46	1.318.408.160.009,00	13,09
2016	189.854.372.832,05	1.520.625.642.288,00	12,49
2017	179.714.918.679,74	1.385.496.109.405,00	12,97
2018	189.478.934.878,69	1.515.799.680.523,00	12,50
2019	223.039.721.642,40	1.631.214.352.393,00	13,67
<b>Rata-rata</b>			<b>12,94</b>

Sumber : Laporan Keuangan audited Kab. Banjar Tahun 2015-2019, data diolah

Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banjar selama periode lima tahun terakhir rata-rata sebesar 12,94 % tergolong masih rendah, hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Banjar masih mengandalkan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam pembiayaan pembangunannya, belum mengandalkan dari pendapatan asli daerah seperti dari pajak dan retribusi daerah yang telah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan mendapatkan hasilnya.

Sehubungan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Tingkat kemandirian yang besar berarti daerah tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Sumarjoko, 2019).

Upaya memenuhi pendanaan pembangunan dan penyelenggaraan daerah, sumber pendapatan dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat juga dari dana perimbangan pemerintah pusat. Sumber-sumber penerimaan dari daerah sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam upaya meningkatkan hasil PAD, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, (Halim dan Iqbal, 2019) antar lain:

- 1) Meningkatkan basis data untuk mengidentifikasi kembali semua wajib pajak;
- 2) Menggiring wajib pajak untuk lebih taat membayar pajak dan retribusi melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Atau memberikan reward kepada wajib pajak;
- 3) Perbaiki sistem akuntansi dalam proses penerimaan pendapatan, sebab sangat rawan kebocoran pada dinas-dinas terkait;
- 4) Meningkatkan sumber daya pegawai di dinas yang berhubungan dengan pendapatan untuk memaksimalkan kinerja mereka.

Keberhasilan otonomi daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan masing-masing daerah dalam mengembangkan kemajuan pemerintahan, pembangunan sektor fisik, sektor ekonomi, sektor tenaga kerja dan sektor lainnya. Diskusi tentang otonomi daerah menurut UU 23 Tahun 2014,

maka tidak dapat lepas dari UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta kebijakan pemerintah pusat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pemerintah daerah diberikan peluang yang lebih luas untuk meningkatkan potensinya terutama dalam bidang perekonomian daerah. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Banjar dapat mengatur penentuan jumlah retribusi daerah, memungut pajak daerah, dan mengelola kekayaan atau APBD, serta dapat menentukan Upah Minimum Regional (UMR).

Pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dijabarkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan yang berkeadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki.

**Tabel Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar Periode 2015 - 2019**

TAHUN	PAD	Pendapatan Daerah	KKD (%)
2015	172.554.625.628,46	1.502.410.703.286,46	11,49
2016	189.854.372.832,05	1.711.541.447.620,05	11,09
2017	179.714.918.679,74	1.629.599.468.617,74	11,03
2018	189.478.934.878,69	1.754.215.067.740,69	10,80
2019	223.039.721.642,40	1.901.700.544.035,40	11,73
<b>Rata-rata</b>			<b>11,23</b>

Sumber : Laporan Keuangan audited Kab. Banjar Tahun 2015-2019, data diolah

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banjar selama periode lima tahun terakhir tidak menunjukkan peningkatan, rata-rata sebesar 11,23 % tergolong masih rendah, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah dari pajak/retribusi daerah belum optimal, masih terdapat potensi pajak/retribusi daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Banjar belum di gali secara maksimal, baik dari besaran tarif pajak/retribusi daerah maupun banyaknya objek pajak/retribusi yang ada.

Widodo (2006), "Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan". PDRB dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada kurun waktu satu tahun sebagai harga dasar.

**Tabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Periode 2015 – 2019 Berdasarkan Harga Konstan**

TAHUN	PDRB	GROWTH (%)
2015	9.950,52	4,40
2016	10.418,68	4,70
2017	10.903,97	4,66
2018	11.450,22	5,01
2019	11.968,28	4,52
<b>Rata-rata</b>		<b>4,66</b>

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, diolah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar selama periode lima tahun terakhir tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, rata-rata sebesar 4,66% dan struktur perekonomian daerah Kabupaten Banjar Tahun selama periode 2015-2019 didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Konstruksi serta sektor Perdagangan yang menyumbang total rata-rata 60,57 % untuk PDRB Kabupaten Banjar selama lima tahun terakhir.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator

penting dalam keberhasilan otonomi daerah dan diharapkan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji masalah berdasarkan uraian di atas dengan mengambil judul “*Hubungan Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar*”.

Pokok permasalahan yang diambil yaitu bagaimana kemampuan dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banjar periode Tahun 2011 s.d 2019 serta hubungan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB Kabupaten Banjar.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat rasio kemampuan keuangan daerah (derajat desentralisasi) dan tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 s.d 2019 serta untuk mengetahui hubungan antara tingkat rasio derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah dengan tingkat rasio pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB (seri 2010 atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha) Kabupaten Banjar Tahun 2011 s.d 2019.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan informasi maupun bahan pertimbangan berbagai pihak, antara lain sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam mengembangkan model-model penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan keuangan daerah di masa yang akan datang, dapat digunakan sebagai gambaran sejauh mana perkembangan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar periode tahun penelitian dan selain itu dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kajian Empirik**

Hasil penelitian mengenai kemampuan dan kemandirian keuangan daerah serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dapat berbeda-beda, tergantung pada potensi pendapatan daerah dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperoleh, sebagaimana hasil penelitian berikut:

1. Stannia Cahaya Suci & Alla Asmara (2014) “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. PAD berpengaruh positif secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio dana perimbangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Risyanto (2015) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004 – 2013”, menunjukkan hasil penelitian bahwa Kemampuan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (growth), Kemandirian Daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan.
3. Rico Putra & Surya Hidayat (2016) dalam penelitian yang berjudul “Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi”, menunjukkan hasil penelitian bahwa signifikansi hasil korelasi semua rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan signifikan.
4. Fadeli Yusuf Afifl & Ukhti Ciptawaty (2020) “Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Lampung Tahun Anggaran 2014-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung berada pada pola hubungan konsultif, sedangkan 13 (tiga belas) kabupaten dan satu kota lainnya berada pada pola hubungan instruktif.

### **Kajian Teoritis**

Rahayu (2014) menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Sedangkan Ibrahim (2013) menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara/daerah yang tercantum dalam APBN/APBD.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suparmoko (2002) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sedangkan pengertian Daerah Otonom menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi itu sendiri berarti hak, wewenang, dan kewajiban suatu pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Syafiie dalam Fahmi, 2019).

Menurut (Alteng Syafruddin dalam Putra, 2018) pengertian APBD ialah rencana kerja atau program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun mendatang. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2002), anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai: (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi; dan (8) alat menciptakan ruang publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara, (Dedi, Iswahyudi dan Maulidah, 2012). Menurut (Mardiasmo, 2004) APBD dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Pengelolaan penerimaan daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dikenal dengan istilah Pendapatan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, (Halim, 2008). Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*), (Mardiasmo, 2004).

Upaya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi, maksudnya agar daerah tidak terlalu mengandalkan atau menggantungkan harapan pada pemerintah pusat, tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonom yang nyata dan bertanggung jawab, (Halim, 2016).

### **Kemampuan Keuangan Daerah (Derajat Desentralisasi)**

Menurut (Tangkilisan, 2007) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, yaitu:

- 1) Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- 2) Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah menurut (Halim, 2007):

- 1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya;

- 2) Ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

**Tabel Kualifikasi Kemampuan Keuangan Daerah**

SKALA	PERSENTASE PAD TERHADAP TPD	KUALIFIKASI
1	0,00 % - 10,00 %	Sangat Kurang
2	10,01 % - 20,00 %	Kurang
3	20,01 % - 30,00 %	Sedang
4	30,01 % - 40,00 %	Cukup
5	40,01 % - 50,00 %	Baik
6	> 50,00 %	Sangat Baik

Sumber : Tim FISIPOL UGM & Balitbang Depdagri (dalam Bisma & Susanto, 2010)

### **Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut (Mahmudi, 2020) bahwa peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola PAD. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Sedangkan (Putra, 2018) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan daerah”.

Menurut Hersey dan Blanchard (dalam Halim, 2007) dikemukakan hubungan tentang pemerintahan pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu :

- 1) Pola Hubungan Instruktif: Peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial);
- 2) Pola Hubungan Konsultif: Campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat melaksanakan otonomi daerah;
- 3) Pola Hubungan Partisipatif: Peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom yang bersangkutan telah mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat;
- 4) Pola Hubungan Delegatif: Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi ke pemerintah daerah.

Berdasarkan teori di atas, dapat dikatakan bahwa karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah.

**Tabel 5. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

KEMAMPUAN KEUANGAN	RASIO KEMANDIRIAN (%)	POLA HUBUNGAN
Rendah Sekali	0,00 - 25,00	Instruktif
Rendah	> 25,00 – 50,00	Konsultif
Sedang	> 50,00 – 75,00	Partisipatif
Tinggi	> 75,00 – 100,00	Delegatif

Sumber : Halim (2007)

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu tujuan utama dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam pembangunan ekonomi adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuncoro (2004), pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan

ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

### Hubungan Antar Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, sementara variabel independen adalah kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitian ini diduga ada hubungan antara kemampuan dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

- 1) Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Pendapatan Daerah (TPD) diduga mempunyai pola hubungan yang rendah terhadap kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 s.d 2019;
- 2) Variabel dana transfer dari pemerintah pusat/provinsi plus pinjaman dan PAD diduga mempunyai pola hubungan yang rendah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 s.d 2019;
- 3) Kemampuan dan kemandirian keuangan daerah diduga mempunyai hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2011 s.d 2019.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan populasi yaitu data Laporan Keuangan (*audited*) Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2011 s.d 2019 dan data PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2010 s.d 2019 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. Metode analisis data yang digunakan adalah rasio-rasio laporan keuangan, pertumbuhan ekonomi dan analisis regresi yang merupakan metode yang digunakan untuk menentukan hubungan antara satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Salah satu metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi yaitu metode kuadrat terkecil atau *ordinary least square* (OLS).

### Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (Derajat Desentralisasi)

Untuk mengetahui kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari rasio derajat desentralisasi atau derajat otonomi fiskal. Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan.

$$\text{Rasio Kemampuan Keuangan Daerah : } \frac{PAD\ t}{TPD\ t} \times 100\ %$$

Keterangan:

PAD t : Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t

TPD t : Total Pendapatan Daerah Tahun t

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian : } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\ %$$

### Rasio Pertumbuhan Ekonomi (Growth)

Untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi regional (*growth*) dapat diukur melalui pendapatan domestik regional bruto (PDRB) saat ini dikurangi dengan PDRB sebelumnya dibagi dengan PDRB saat ini.

$$GRW = \frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \times 100 \%$$

Keterangan:

GRW = tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase (%)  
PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto pada Tahun t  
PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto pada Tahun sebelumnya  
t = Tahun t  
t-1 = Tahun t – 1

### Regresi Linier Berganda Metode *Ordinary Least Square* (OLS)

Pendekatan yang digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan adalah regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Model regresi OLS digunakan untuk menemukan hubungan terbaik antara variabel independen X dan variabel dependen Y, mengukur kekuatan hubungan dan melakukan prediksi terhadap variabel Y melalui variabel X yang diamati, (Nur Azizah dan Henny Pramodyo, 2019). Adapun model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$GRW = \alpha_0 + \alpha_1 KMD + \alpha_2 KKD + ei$$

Di mana:

GRW = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi  
KMD = Kemandirian Keuangan Daerah  
KKD = Kemampuan Keuangan Daerah  
 $\alpha_1, \alpha_2$  = Koefisien regresi  
 $\alpha_0$  = konstanta  
ei = variabel pengganggu (*error term*)

### Uji Asumsi Klasik

Penggunaan metode OLS memerlukan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi. Apabila asumsi klasik tersebut tidak terpenuhi, maka estimator yang dihasilkan bersifat bias dan interpretasi hasil yang diberikan pun menjadi tidak valid, (Zahrotul, Jajang dan Agustin, 2019). Terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedasitas, dan Uji Autokorelasi.

### Uji Statistik

Untuk mendapatkan persamaan regresi yang terbaik secara statistik disebut BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) beberapa kriteria untuk memenuhi kriteria BLUE adalah 1) Uji F, 2) Uji T, 3) Uji R<sup>2</sup> (Gujarati, 2003). Kriteria digunakan untuk menguji hipotesis secara statika didalam analisis regresi sederhana dan regresi berganda dilakukan melalui pendekatan uji signifikan (*test significant*). Uji signifikan secara umum merupakan prosedur untuk mengetahui seberapa besar signifikansi kebenaran suatu hipotesis nol (H<sub>0</sub>) atau untuk menentukan apakah sample yang diamati berbeda secara nyata dari hasil-hasil yang diharapkan. Perhitungan statistik dikatakan signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H<sub>0</sub> ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H<sub>0</sub> diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Tahun	PAD	TPD	KKD (%)	Kualifikasi
2011	96.413.690.371,60	948.891.704.963,60	10,16	Kurang
2012	147.228.975.151,79	1.231.830.424.157,79	11,95	Kurang
2013	190.828.576.727,93	1.226.495.629.254,93	15,56	Kurang
2014	160.159.439.171,31	1.225.440.993.043,31	13,07	Kurang
2015	172.554.625.628,46	1.502.410.703.286,46	11,49	Kurang
2016	189.854.372.832,05	1.711.541.447.620,05	11,09	Kurang
2017	179.714.918.679,74	1.629.599.468.617,74	11,03	Kurang



Tahun	PAD	TPD	KKD (%)	Kualifikasi
2018	189.478.934.878,69	1.754.215.067.740,69	10,80	Kurang
2019	223.039.721.642,40	1.901.700.544.035,40	11,73	Kurang
<b>Rata-rata</b>			<b>11,88</b>	<b>Kurang</b>

Sumber : Laporan Keuangan audited Kab. Banjar Tahun 2011-2019, data diolah

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan walaupun relatif kecil. Pada Tahun 2011, rasio kemampuan keuangan daerah mencapai prosentase yang terendah yaitu 10,16 % dengan kategori kurang. Namun pada Tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup baik menjadi 15,56 % karena ada peningkatan dari sisi PAD walaupun masih dalam kategori kurang.

Dari uraian dan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemampuan Keuangan Daerah selama periode sembilan tahun pada pemerintahan Kabupaten Banjar masih dalam skala interval yang kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 10,01 - 20,00 yaitu rata-rata sebesar 11,88 % dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang kurang dalam membiayai pembangunan daerah.

#### Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Transfer + Pinjaman	KMD (%)	Pola Hubungan
2011	96.413.690.371,60	810.361.216.200,00	11,90	Instruktif
2012	147.228.975.151,79	1.068.894.050.202,00	13,77	Instruktif
2013	190.828.576.727,93	1.032.150.635.897,00	18,49	Instruktif
2014	160.159.439.171,31	1.064.281.553.872,00	15,05	Instruktif
2015	172.554.625.628,46	1.318.408.160.009,00	13,09	Instruktif
2016	189.854.372.832,05	1.520.625.642.288,00	12,49	Instruktif
2017	179.714.918.679,74	1.385.496.109.405,00	12,97	Instruktif
2018	189.478.934.878,69	1.515.799.680.523,00	12,50	Instruktif
2019	223.039.721.642,40	1.631.214.352.393,00	13,67	Instruktif
<b>Rata-rata</b>			<b>13,77</b>	<b>Instruktif</b>

Sumber : Laporan Keuangan audited Kab. Banjar Tahun 2011-2020, data diolah

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banjar masuk dalam kategori Instruktif dimana pemerintah daerah dinilai belum mampu melaksanakan otonomi daerah, sehingga kontribusi pemerintah pusat masih tinggi. Dapat dilihat selama periode 2011-2019, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 13,77 % sehingga dapat dikatakan masuk dalam kategori instruktif (0 - 25 %).

#### Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (Growth)

Tahun	PDRB	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
2010	7.605,09	-
2011	8.158,85	7,28 %
2012	8.670,84	6,28 %
2013	9.069,63	4,60 %
2014	9.530,73	5,08 %
2015	9.950,52	4,40 %
2016	10.418,68	4,70 %
2017	10.903,97	4,66 %
2018	11.450,22	5,01 %
2019	11.968,28	4,52 %

Sumber: <https://banjarkab.bps.go.id>, data diolah

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa sejak Tahun 2011 s.d Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar fluktuatif cenderung menurun. Dari 7,28 % di Tahun 2011 menurun menjadi 4,25 % di Tahun 2019. Hal ini terjadi karena ada perubahan pola aktivitas

perekonomian masyarakat di Kabupaten Banjar yang memicu adanya perubahan penghasilan masyarakat akibat dari perlambatan ritme ekonomi global yang membawa dampak pada perekonomian

### Analisis Hubungan Kemampuan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan perhitungan menggunakan Eviews 9.0 diperoleh persamaan sebagai berikut:

**Tabel Hasil Uji Ordinary Least Square**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.893062	3.045619	2.919952	0.0266
KMD	1.337571	1.703471	0.785203	0.4622
KKD	-1.864453	2.115256	-0.881431	0.4120
R-squared	0.205188	Mean dependent var		5.170000
Adjusted R-squared	-0.059749	S.D. dependent var		0.970773
S.E. of regression	0.999354	Akaike info criterion		3.097786
Sum squared resid	5.992247	Schwarz criterion		3.163527
Log likelihood	-10.94004	Hannan-Quinn criter.		2.955916
F-statistic	0.774477	Durbin-Watson stat		0.665028
Prob(F-statistic)	0.502104			

Sumber : Eviews 9.0, 2021, data diolah

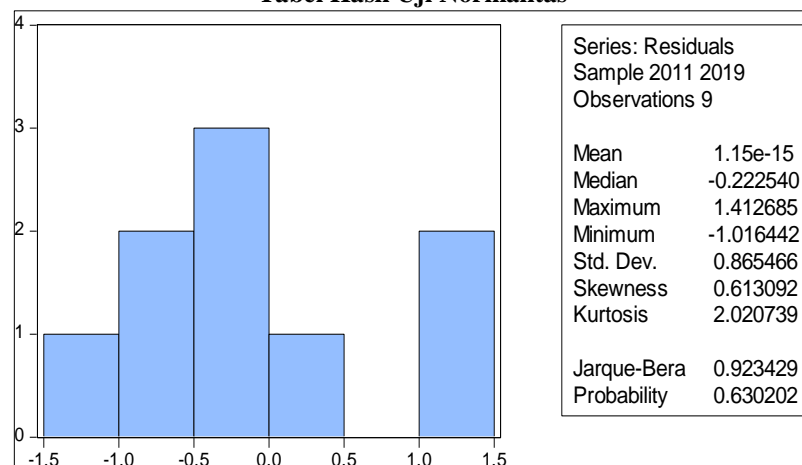
Berikut hasil regresi yang dimasukkan ke dalam model:

$$GRW = 8.893062 + 1.337571 (KMD) - 1.864453 (KKD)$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas maka dapat dijelaskan bahwa koefisien konstanta menunjukkan angka 8.893062, hal ini berarti bahwa jika seluruh variabel bebas sama dengan nol maka pertumbuhan ekonomi sebesar 8.893062%. Apabila terjadi kenaikan variabel KMD sebesar 1% maka GRW akan mengalami kenaikan sebesar 1.337571 % (dengan asumsi variabel lain bersifat konstan) dan apabila terjadi kenaikan variabel KKD sebesar 1% maka GRW akan mengalami penurunan sebesar 1.864453% (dengan asumsi variabel lain bersifat konstan).

### Uji Asumsi Klasik

**Tabel Hasil Uji Normalitas**



Sumber : Eviews 9.0, 2021, data diolah

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai probability sebesar 0,630202 > 0,05 (signifikansi), artinya residual data penelitian terdistribusi secara normal.

**Tabel Hasil Uji Multikolinieritas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	9.275793	83.59014	NA
KMD	2.901812	5050.727	92.33135
KKD	4.474310	5778.739	92.33135

Sumber : Eviews 9.0, 2021, data diolah

Pada Tabel kolom *Centered VIF* untuk Variabel KMD dan KKD sebesar  $> 10$ , sehingga dapat disimpulkan terdapat multikolinieritas pada data. Untuk mengatasi hal ini, peneliti melakukan salah satu cara untuk mengatasi adanya multikolinieritas yaitu dengan mengeluarkan satu variabel bebas yang berkorelasi dengan variabel lainnya.

**Tabel Hasil Uji Multikolinieritas (Tanpa Variabel KKD)**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5.876721	54.70219	NA
KMD	0.030427	54.70219	1.000000

**Tabel Hasil Uji Multikolinieritas (Tanpa Variabel KMD)**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.564672	62.58696	NA
KKD	0.045805	62.58696	1.000000

Sumber : Eviews 9.0, 2021, data diolah

Berdasarkan Kedua Tabel di atas, dengan mengeluarkan salah satu variabel bebas (KKD atau KMD) dapat disimpulkan bahwa nilai  $VIF < 10$  sehingga tidak terdapat multikolinieritas pada data.

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada data adalah dengan uji *white*. Jika nilai probabilitas  $< \alpha = 5\%$ , maka terjadi gejala heterokedastisitas dalam model penelitian sedangkan jika nilai  $> \alpha = 5\%$ , maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model penelitian. Hasil uji heterokedastisitas adalah sebagai berikut:

**Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.695139	Prob. F(5,3)	0.6638
Obs*R-squared	4.830563	Prob. Chi-Square(5)	0.4369
Scaled explained SS	1.095721	Prob. Chi-Square(5)	0.9545

Sumber : Eviews 9.0, 2021, data diolah

Dari Tabel di atas dapat dikatakan bahwa *Obs\*R-squared* dengan nilai probabilitas chi square  $0.4369 > \alpha = 5\%$ , sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada data.

Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey* (BG-Test) untuk menguji ada tidaknya autokorelasi. Hasil uji BG sebagai berikut:

**Tabel Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	3.829531	Prob. F(2,4)	0.1177
Obs*R-squared	5.912273	Prob. Chi-Square(2)	0.0520

Sumber : Eviews 9.0, 2021, data diolah

Dari Tabel 24 dapat dikatakan bahwa Obs\*R-squared dengan nilai probabilitas *chi square*  $0.0520 > \alpha = 5\%$ , sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada data.

### Uji Statistik

Uji t merupakan pengujian variabel independen secara individual yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Banyaknya uji individual adalah sama dengan banyaknya variabel independen. Jika nilai t hitung  $< t$  tabel dan signifikansi  $> \alpha = 5\%$  artinya  $H_0$  diterima. Sebaliknya jika nilai t hitung  $> t$  tabel dan signifikansi  $< \alpha = 5\%$  artinya  $H_0$  ditolak. Berikut adalah hasil uji hipotesis tersebut:

#### Pengujian Hipotesis Variabel Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)

- $H_0 : \beta_1 = 0$  Kemampuan Keuangan Daerah tidak berhubungan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  
 $H_1 : \beta_1 \neq 0$  Kemampuan Keuangan Daerah berhubungan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan Tabel Hasil Uji *Ordinary Least Square* diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) mempunyai tanda negatif dan besarnya adalah -1.864453, nilai t hitung variabel KKD adalah -0.881431 dengan nilai probabilitas 0.4120. Dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$ , diperoleh t tabel sebesar 2.306004, maka t hitung lebih kecil t tabel, yaitu  $-0.881431 < 2.306004$ , serta nilai probabilitasnya  $> \alpha = 5\%$  ( $0.4120 > 0.05$ ), maka  $H_0$  diterima.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah tidak berhubungan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Sehingga jika ada peningkatan variabel kemampuan keuangan daerah maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan namun tidak signifikan.

#### Pengujian Hipotesis Variabel Kemandirian Keuangan Daerah (KMD)

- $H_0 : \beta_2 = 0$  Kemandirian Keuangan Daerah tidak berhubungan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi  
 $H_1 : \beta_2 \neq 0$  Kemandirian Keuangan Daerah berhubungan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Tabel Hasil Uji *Ordinary Least Square* diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel Kemandirian Keuangan Daerah (KMD) mempunyai tanda positif dan besarnya adalah 1.337571 dengan nilai probabilitas 0.4622, nilai t hitung variabel KMD adalah 0.785203. Dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$ , diperoleh t tabel sebesar 2.306004, maka t hitung lebih kecil dari t tabel, yaitu  $-0.785203 < 2.306004$ , dan nilai probabilitasnya  $> \alpha = 5\%$  ( $0.4622 > 0.05$ ), maka  $H_0$  diterima.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah tidak berhubungan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Sehingga jika ada peningkatan variabel kemandirian keuangan daerah maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan namun tidak signifikan.

## Uji F

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen yang ada secara bersama-sama mempunyai hubungan dengan variabel dependennya. Nilai F hitung yang didapatkan akan dibandingkan dengan nilai F tabel dan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Apabila nilai F hitung  $> F$  tabel atau signifikansi  $< \alpha$  maka  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model cocok atau paling sedikit ada satu variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$  Variabel independen secara bersama-sama tidak berhubungan dengan variabel dependen.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$  Variabel independen secara bersama-sama berhubungan dengan variabel dependen.

Berdasarkan Tabel Hasil Uji *Ordinary Least Square* diketahui nilai F hitung yang diperoleh dari regresi model adalah sebesar 0.774477 dengan nilai probabilitas sebesar 0.502104. Dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$ , diperoleh F tabel sebesar 4.737414, maka F hitung  $<$  dari F tabel, yaitu  $0.774477 < 4.737414$ , serta nilai probabilitasnya  $> \alpha = 5\%$  ( $0,502104 > 0.05$ ), maka  $H_0$  diterima.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dan Kemandirian Keuangan Daerah (KMD) tidak berhubungan terhadap pembentukan tinggi rendahnya pertumbuhan Ekonomi.

## Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determenasi)

Uji R<sup>2</sup> dimaksudkan untuk menghitung seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Berdasarkan Tabel Hasil Uji *Ordinary Least Square*, besarnya nilai statistik koefisien determinasi yang telah disesuaikan (*R-squared*) yang diperoleh dari regresi linier berganda adalah sebesar 0.205188. Ini artinya bahwa sekitar 20,51% variasi variabel dependen (perubahan pertumbuhan ekonomi) dapat dijelaskan oleh variasi independen yang dimasukkan dalam model yaitu KKD dan KMD. Sisanya sebanyak 79,49% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Rasio Kemampuan Keuangan Daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah kurang karena hanya memiliki rata-rata 11,88 %. Hal ini menunjukkan bahwa dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya, Pemerintah Kabupaten Banjar masih sangat tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari luar pendapatan asli daerah.
- 2) Ratio Kemandirian Keuangan Daerah, rata-rata rasio selama periode 2011-2019 sebesar 13,97 % sehingga dapat dikatakan masuk dalam kategori instruktif (0 – 25 %). Rasio kemandirian yang masih rendah dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah atau dasar pengenaan tarif pajak serta biaya retribusi yang masih rendah.
- 3) Kemampuan Keuangan Daerah mempunyai hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat Pertumbuhan Ekonomi, artinya jika ada peningkatan kemampuan keuangan daerah maka pertumbuhan ekonomi akan menurun namun tidak signifikan. Sedangkan untuk Kemandirian Keuangan Daerah mempunyai hubungan positif namun tidak signifikan terhadap tingkat Pertumbuhan Ekonomi, artinya jika ada peningkatan kemandirian keuangan daerah maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat namun tidak signifikan. Dan jika dilakukan uji secara bersamaan, maka secara bersama-sama Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah juga tidak mempunyai hubungan dengan tinggi rendahnya Pertumbuhan Ekonomi.

Saran-saran terkait peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah:

- 1) Intensifikasi
  - Pemerintah Kabupaten Banjar harus lebih tertib lagi dalam menetapkan dan penyetoran pajak dan retribusi;
  - Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku;

- Melakukan langkah-langkah pengendalian lain guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Ekstensifikasi
- Menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada pajak dan retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah;
  - Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Muhammad Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andriani, Siska. 2017. Uji Park Dan Breusch Pagan Godfrey Dalam Pendeteksian Heteroskedastisitas Pada Anallisa Regresi. *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika. Vol. 8, No.1. p-ISSN 2086-5872, e-ISSN 2540-7562*.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. 2020. *Booklet Infografis Statistik Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020*. Kabupaten Banjar: BPS Kabupaten Banjar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. 2020. *Statistik Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020*. Kabupaten Banjar: BPS Kabupaten Banjar.
- Bambang Supomo & Nur Indriantoro. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Penerbit BFEE UGM.
- Bastian, Indra. 2009. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bawono, Anton & Asya Fendha Ibnu Shina. 2018. *Ekonometrika Terapan (Untuk Ekonomi dan Bisnis Islam, Aplikasi dengan Eviews)*. Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Salatiga.
- I Dewa Gde Bisma & Hery Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3*.
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra & Maulidah Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Fadeli Yusuf Afifl & Ukhti Ciptawaty. 2020. Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Lampung Tahun Anggaran 2014-2018. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 9.7, ISSN : 2337-3067*
- Fahmi, Irham. 2019. *Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia*. Depok. PT Raja Grafindo Persada.
- Gujarati, Damodar N, 2003, *Ekonometri Dasar*. Terjemahan Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. 2008. *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ibrahim, Zaini. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro. Cetakan 1*. Banten : LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanudin.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2020. *Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Michael P. Todaro & Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi. Jilid 1. Edisi Kesebelas*. Terjemahan Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.
- Noor, Hendry Faizal. 2015. *Ekonomi Publik: Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Indeks.
- Nur Azizah & Henny Pramoedyo. 2019. Efektifitas Model Regresi OLS (Ordinary Least Square) dan Geographically Weighted Regression (GWR) pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur. *Prosiding Seminar Nasional Integrasi Matematika dan Nilai Islami Vol.3, No.1, p-ISSN: 2580-4596; e-ISSN: 2580-460X*.
- Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Rahayu, Ani Sri. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal. Edisi 1, Cetakan 2*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Risyanto, Hilmi. 2015. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004-2013. *Coopetition, Vol.VI, No.1*.
- Rico Putra & Surya Hidayat. 2016. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3, No. 4*.
- Stannia Cahaya Suci & Alla Asmara. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol. 3, No. 1*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjoko, Imam. 2019. Analisis Keuangan Pusat Daerah. *Jurnal Defis No. ISSN 2599-0284, Edisi 5, DJPK*.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik : Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN
- Zahrotul Aflakhah, Jajang & Agustini Tripena Br. Sb. 2019. Kajian Metode Ordinary Least Square dan Robust Estimasi M pada Model Regresi Linier Sederhana yang Memuat Outlier. *Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika (JMP) Vol. 11 No. 1*.